



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	Ket.
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, dan Perubahan RPJPD/RPJMD	Meningkatnya Kualitas Perencanaaan Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	96,51	96,55	96,60	96,65	96,70	96,75	96,80	
		Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	97,30	97,35	97,40	97,45	97,50	97,55	97,60	
Inmendagri No.2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029		Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	90,00	90,05	90,10	90,15	90,20	90,25	90,30	
			2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	93,20	93,25	93,30	93,35	93,40	93,45	93,50	
Permendagri No.18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	N/A	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	
			4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	N/A	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	
Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan : Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan : Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi			5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	N/A	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah	Persentase target tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	



1. Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran ini diukur melalui “Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah”. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga responsif terhadap kondisi faktual dan kebutuhan nyata di daerah. Semakin tinggi persentase kesesuaian, semakin baik kualitas dokumen perencanaan tersebut dalam menjawab tantangan pembangunan. Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Isu Strategis yang diakomodir Prioritas Daerah}}{\text{Total Isu Strategis}} \times 100$$

2. Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sinergitas antara dokumen perencanaan daerah dan nasional menjadi krusial untuk menciptakan kesinambungan pembangunan, tingginya tingkat keselarasan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menerjemahkan arah kebijakan pembangunan nasional ke dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan di tingkat daerah, yang pada gilirannya dapat memperkuat keterpaduan program lintas sektor dan wilayah. Sasaran ini diukur dengan lima indikator, yaitu:

- a. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Indikator RPJMN yang Selaras dalam RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator RPJMN yang Relevan untuk Daerah}} \times 100$$

- b. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan Prioritas RKP yang Diakomodasi dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program/Kegiatan Prioritas RKP yang Relevan untuk Daerah}} \times 100$$



- c. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target Indikator Makro pada RPJMD}}{\text{Target Makro RKPD}} \times 100$$

- d. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target IKK pada RPJMD Per Urusan}}{\text{Target IKU Renstra PD}} \times 100$$

- e. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD, Indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target Indikator Kinerja Program pada RKPD}}{\text{Target Indikator Program di Renja PD}} \times 100$$

3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah.

Integrasi antara perencanaan pembangunan dan kinerja perangkat daerah menjadi tolok ukur penting efektivitas pelaksanaan pembangunan. Hal ini diukur dengan Indikator “persentase target tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja perangkat daerah”. Semakin tinggi angka ini, semakin menunjukkan bahwa dokumen perencanaan benar-benar diimplementasikan oleh perangkat daerah sebagai acuan kinerja, indikator tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target dan Sasaran Pembangunan Daerah yang Dijadikan Target/Sasaran Perangkat Daerah}}{\text{Total Jumlah Target dan Sasaran Pembangunan Daerah}} \times 100$$

4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda

Sebagai lembaga perencana daerah, Bappeda memegang peran kunci dalam memastikan keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola organisasi Bappeda diukur melalui “Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah”. Indikator ini mencerminkan seberapa baik Bappeda mendukung kebutuhan perencanaan perangkat daerah lainnya, baik dari sisi data, fasilitasi, maupun koordinasi.